

Analisis Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Separatisme di Wilayah Papua

Aisyah Izdihar Windani¹ Almuchalif Suryo²

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: aisyahizdiharwindani101@gmail.com¹ suryojayapura@gmail.com²

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas mengenai Analisis Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Separatis di Wilayah Papua. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman separatisme di wilayah Papua. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan deskriptif analitis dimana peneliti menganalisis setiap data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen pemerintah, dan sumber – sumber lain seperti web site yang berkaitan dengan penelitian. Hasilnya penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman separatisme di wilayah Papua. Simpulannya separatisme merupakan ancaman yang nyata bagi kedaulatan bangsa terutama bagi Indonesia, namun Pemerintah tidak menyerah dan berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini hingga ke akar – akarnya.

Kata Kunci: Strategi, Separatisme, Papua



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertahanan negara adalah suatu fungsi dalam pemerintahan untuk mewujudkan pertahanan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari segala ancaman dan gangguan (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2014). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dimana letak geografisnya diantara dua benua dan dua samudera yang mana Indonesia sebagai urat nadi jalan lintasan perdagangan internasional menjadikan Indonesia memiliki tantangan yang besar dalam menghadapi ancaman keamanan terhadap rentannya persengketaan perbatasan karena berbatasan langsung dengan sepuluh negara antara laut dan darat. Tantangan terbesar bangsa Indonesia bukan hanya dari luar saja namun Indonesia menghadapi ancaman dari dalam. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki beragam suku, budaya dan agama. Hal ini lah yang membuat Indonesia selalu dihadapi tantangan dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Seperti adanya gerakan pemberontakan yang berusaha untuk menghancurkan kedaulatan negara. Gerakan yang bertujuan ingin memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme muncul karena adanya ketidak puasan terhadap perilaku pemerintahan yang dianggap tidak adil dan tidak demokratis atau suatu kelompok yang dianggap merugikan. Gerakan ini terbentuk untuk memperjuangkan politik, sosial dan ekonomi namun seringkali melibatkan kekerasan dan bahkan baku tembak. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai bagaimana strategi pertahanan Indonesia menghadapi ancaman separatisme di wilayah Papua. Analisis ini akan membahas mengenai strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam dan apa saja upaya pemerintahan Indonesia menghadapi ancaman separatisme di wilayah Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *literatur review* dengan pendekatan deskriptif analitis dimana peneliti menganalisis setiap data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen pemerintah, dan sumber – sumber lain seperti *web site* yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman

Strategi Pertahanan merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk melindungi suatu negara, wilayah, atau aset dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Suatu kewajiban bagi pemerintah Indonesia maupun seluruh lapisan masyarakat dalam melindungi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap utuh. Strategi pertahanan Indonesia berkembang berdasarkan kondisi geografis serta kehasan Indonesia sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari banyaknya gugusan pulau yang dihubungkan oleh laut ke selat. Indonesia memiliki dua per tiga wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Indonesia memiliki 12 pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu: India, Vietnam, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Palau (Thomas, 2019). Oleh karenanya Indonesia memerlukan perhatian yang khusus dalam membangun strategi pertahanannya dalam mencegah seluruh ancaman yang akan berdampak bagi Indonesia. Terutama dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Strategi pertahanan negara disusun dengan memperhatikan tiga elemen dasar yang menyertainya yakni:

1. Membentuk (*to shape*): strategi yang menciptakan lingkunagn keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional, stabilitas Kawasan, mengurangi atau meniadakan ancaman, mencegah terjadinya konflik, mencegah adanya agresri dan mencegah adanya berbagai tindakan kekerasan lainnya.
2. Merespon (*to respond*): strategi yang merespon berbagai spektrum krisis yang dapat mengakibatkan ancaman dan juga resiko kepentingan nasional.
3. Menyiapkan (*to prepare*): kesiapan negara untuk menyiapkan pertahanan dalam menghadapi ancaman di masa yang akan datang dengan memusatkan upaya pembangunan kekuatan, pengembangan dalam konsep, serta adanya pengorganisasian pertahanan dalam pemanfaatan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional (Kementrian Pertahanan RI, 2014).

Dengan demikian dengan adanya tiga elemen yang mendasari strategi petahanan negara ini dapat menjadi persiapan bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi atau kesiapan sebelum terjadinya ancaman dari dalam maupun dari luar. Sehingga semuanya akan proporsional dan dapat terkoordinasi dengan baik serta akan meniadakan adanya Gerakan pemberontakan yang mungkin akan terjadi dan yang sudah terjadi. Seperti mencegahnya adanya Gerakan yang ingin melepaskan diri dari wilayah NKRI yaitu gerakan separatisme. Indonesia memiliki karakteristik. geografis yang terletak di posisi silang antara aneka sumber daya alam dan kemajemukan demografis yang mengisyaratkan mudahnya ancaman separatisme di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 gerakan separatisme masih aktif di beberapa daerah salah satunya didaerah Papua. Ancaman separatisme di wilayah papua yang tidak kunjung usai dari tahun 1960-an, pada tahun 1961 Presiden Soekarno memimpin Gerakan Trikora untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda yang pada akhirnya di tahun 1963 Indonesia berhasil dan meresmikan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia (Kukuh, 2023).

Upaya Pemerintahan Indonesia Menghadapi Ancaman Separatisme di Wilayah Papua

Separatisme adalah bentuk nyata ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan yang berasal dari dalam negeri. Gerakan ini dapat mengganggu bahkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dan sumber daya manusia (SDM) dimana Indonesia memiliki beragam suku dan budaya menjadikan Indonesia rawan akan gerakan separatisme sebagai contohnya di wilayah Papua. Papua adalah wilayah Indonesia bagian timur yang sampai sekarang memiliki berbagai konflik wilayah salah satunya adanya separatisme. Konflik di Papua adalah salah satu ancaman yang serius bagi keutuhan bangsa Indonesia, adanya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua. Faktor internal penyebab terjadinya konflik di Papua yakni karena ketidakpuasan Masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Seperti yang merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang berganti nama menjadi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) menyatakan adanya empat akar permasalahan yang menyebabkan Papua hingga kini belum terselesaikan yakni; (1) Masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia yakni intimidasi dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua yang mengalami adanya rasisme. (2) Kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari tahun 1965 melalui operasi militer yang nyaris adanya ketidakpertanggungjawaban dari negara sejak operasi Trikora pada masa Presiden Soekarno. Meningkatnya kekerasan dan adanya sandera tidak sesuai dengan HAM. (3) Perasaan terdiskriminasi dan termarginalkan diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan Pembangunan di tanah mereka yang mengakibatkan adanya perasaan yang tidak dianggap dan berujung diskriminasi, seperti adanya Pembangunan proyek-proyek ekstraktif yaitu proyek yang mengambil sumber daya alam langsung dari bumi seperti minyak, batu bara, dan mineral yang masuk ke Papua dengan tanpa persetujuan dari masyarakat Papua. (4) Kegagalan Pembangunan di Papua yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua (Tempo.co, 2024).

Selain itu adanya beberapa faktor eksternal yang turut ikut serta dalam mendukung gerakan separatisme di Papua yang dapat memperkeruh suasana seperti dorongan isu Papua di forum internasional perserikatan bangsa-bangsa (PBB), bantuan swaka politik serta adanya bantuan logistik yang diberikan kepada gerakan ini. Separatisme muncul pertama kali ketika suku Arfak menyerang Batalyon 751 (Brawijaya) di wilayah Manokwari Papua pada 26 Juli 1965 dipicu oleh adanya penolakan para anggota *Papoea Vrijwilligers Korp* (PVK) dari Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak bentukan Belanda untuk demobilisasi, penahanan Masyarakat Papua, serta angka pengangguran yang tinggi dan adanya kekurangan pangan di kalangan suku tersebut, sejak saat itu muncul adanya pemberontakan yang bersifat sporadic yang berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan kemerdekaan Papua (Vemmy, 2011). Separatisme menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia dari zaman kolonialisme Belanda dilihat dari beberapa kebijakan pemerintahan Indonesia dalam memecahkan permasalahan konflik di Papua mulai dari Presiden yang pertama yakni Presiden Soekarno yang membentuk Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 dalam rapat raksasa di Alun-alun Utara Yogyakarta, Soekarno menyatakan dengan tegas akan menggagalkan pembentukan negara Papua, mengibarkan sang merah putih, dan melaksanakan mobilisasi umum di wilayah Papua (Untung, 2019). Selanjutnya diteruskan oleh Presiden keempat yakni Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur memberikan kebijakan bagi masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera kemerdekaan bagi *West Papua*, dilanjut dengan kebijakan dari Presiden keenam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk UU Otonomi Khusus bagi

masyarakat di wilayah Papua dan mendorong adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo yang membebaskan tapol atau tahanan politik dari wilayah Papua dan membentuk akses bagi jurnalis asing untuk memasuki wilayah Papua serta membangun pendekatan keamanan dan meningkatkan fokus pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua (Thomas, 2022). Dari beberapa kebijakan yang ada konflik di Papua tidak kunjung mereda namun terus memanas dan tidak ada tanda – tanda bahwa konflik ini akan teresolusi. Namun demikian pemerintah tidak kunjung putus asa dalam menangani konflik di Papua, Menurut bapak Prabowo Subianto (2023) pada saat debat kampanyenya menyatakan bahwa Gerakan Papua Merdeka itu rumit karena ada campur tangan oleh pihak asing, dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi hal yang harus diutamakan dan semua harus dirangkul.

Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia dalam pidatonya menegaskan bahwa beliau akan berkomitmen dalam menjaga integritas wilayah NKRI dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama di wilayah Papua. Dalam pernyataannya beliau menekankan bahwa gerakan separatisme di Indonesia akan di basmi hingga ke akar – akarnya dengan tujuan agar melindungi kedamaian dan kedaulatan Indonesia dengan mengerahkan keamanan negara di setiap wilayah terutama di wilayah Papua, salah satunya membangun beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Skouw di Jaya Pura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Boven Digoel Papua Selatan serta membangun penguatan operasi intelijen sebagai sarana untuk memantau aliran dana logistik yang masuk ke kelompok gerakan separatisme (AutoPopuler ID, 2024). Hal ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam memantau gerakan separatisme di daerah perbatasan untuk menangani separatisme di wilayah Papua. Didukung oleh menteri pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (2024) dalam pidatonya yang menegaskan bahwa beliau akan berkomitmen dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara mengingat Papua adalah wilayah yang penting dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi bagi negara kesatuan republik Indonesia maka dari itu Papua harus memiliki sistem keamanan yang tangguh dan siap menghadapi segala ancaman dengan tetap menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan dialog antara pemerintahan pusat dan masyarakat Papua serta mendengarkan aspirasi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan akses yang lebih baik seperti pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan yang dapat membantu untuk memenuhi ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintahan pusat yang menjadi pemicu adanya konflik di Papua. Selain itu pemerintah juga akan membangun swasembada pangan dan swasembada energi untuk membangun pemerataan ekonomi di wilayah Papua seperti adanya *food estate* yakni konsep pengembangan pertanian, perkebunan, dan perternakan secara integrasi yang sedang dikembangkan di wilayah Papua dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Separatisme yang terjadi di Indonesia yang sudah berangsur lama sejak kolonialisme Belanda pada tahun 1960-an hal ini menunjukkan bahwasannya permasalahan ini tidaklah hal yang ringan namun merupakan hal yang rumit untuk di selesaikan secara permanen. Gerakan separatisme juga menjadi tantangan yang terbesar bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga integritasnya dalam menjaga keamanan, persatuan serta persatuan bangsa Indonesia. Gerakan separatisme ini akan tetap aktif dan berkembang jika pemerintah Indonesia tidak segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menanganinya. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah mengupayakan kedaulatan Indonesia seperti dengan membasmi gerakan

separatisme sampai ke akar – akarnya dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni membangun keamanan di daerah perbatasan di wilayah Papua dengan tujuan untuk memantau gerakan separatisme di Papua. Bukan hanya keamanan namun pemerintahan Indonesia juga berencana untuk mengembangkan ekonomi dengan dibangunkannya *Food Estate* sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan pertanian, perkebunan, dan peternakan agar terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia dan mengutamakan Hak Asasi Manusia diatas segalanya diseluruh wilayah Indonesia terutama Papua. Oleh karenanya pemerintah harus memperhatikan setiap langkah dan tindakan agar kepercayaan warga di wilayah Papua tetap terjaga, dengan benar – benar menegakkan HAM serta mengembangkan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang dapat mempermudah masyarakat Papua dengan harapan dapat menuntaskan kemiskinan di wilayah Papua.

Novelty dari artikel “Analisis Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Separatisme di Wilayah Papua” terletak pada analisis mendalam mengenai konteks sejarah dan sosial, pendekatan strategis baru, interaksi antara militer dan sipil, evaluasi kebijakan terkini, serta rekomendasi inovatif untuk masa depan. Ini semua berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan separatisme di Papua dan cara-cara efektif untuk menghadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Auto Populer ID. (2024). OPM Bakal Dicaput Sampai ke Akarnya! Prabowo Tegas Lindungi Papua Sebagai Bagian dari NKRI. [Video file]. <https://www.youtube.com/watch?v=70bHil6wjdm>.
- Kementerian Republik Indonesia (2014). Strategi Pertahanan Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/262014.pdf>.
- Kukuh, A.N., George, R. D., Arya. D. N., Savira K., (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. Jurnal kewarganegaraan. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4699/2891/11965&ved=2ahUKEwjdw4fi06aLAXVDzzgGHXXvOFcQFnoECBIAAQ&usq=AOvVaw3pDK3T72fBtOaHU0SWmj1d>
- Tempo.co. (2024). Empat Permasalahan Papua menurut LIPI dibuku Papua Road Map (2009). <https://www.tempo.co/politik/inilah-4-akar-masalah-papua-menurut-lipi--68187>.
- Thomas, A. K. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/356>.
- Thomas, S. (2019). Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=jkskn>.
- tvOneNews. (2023). Janji Prabowo untuk Membrantas Masalah HAM di Papua Khususnya KKB. https://www.youtube.com/watch?v=R_ERqTewelE.
- Untung, S. (2019). Solusi Kontemporer Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil, dan Bermartabat. Jurnal Lemhanas. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/52/14&ved=2ahUKEwjuy4Ta4aaLAXWvSGwGHVC1J7wQFnoECBIAAQ&usq=AOvVaw2vHjv6ji6gAALCU3mdgSVU>.
- Vemmy R. (2011). Potensi Ancaman Separatis Gerakan Papua Merdeka Terhadap NKRI. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20341392>.